

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA**

**MODAL PADA PEMERINTAHAN PROPINSI**

**SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FITRI RAMADHANI**

**NPM : 12 833 0261**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2016**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan PAD dengan nilai signifikan 0,026 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan t-hitung adalah 3,998 dan dengan menggunakan tabel t, diperoleh t tabel sebesar 2,035, hal ini menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $3,998 > 2,035$ ) yang berarti PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.DAU dengan nilai signifikan 0,013 nilai ini lebih besar dari 0,05 sedangkan t-hitung adalah 3,831 dan dengan menggunakan tabel t-, diperoleh t tabel sebesar 2,035, hal ini menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $3,831 > 2,035$ ) yang berarti DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.PAD dan DAU mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Pada nilai signifikannya sebesar 0,038. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah raabil aalamin*, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang senantiasa memberikan doa yang tulus, memotivasi serta pengorbanan moril dan materi yang tidak terhingga untuk keberhasilan penulis, semoga apa yang diberikan oleh orang tua penulis dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan kerendahan hati, tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ya'kub Matondang, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ikhsan Effendi M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores SE. M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Siyang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Warsani P. Sari SE. MM selaku sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan dan membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan dan staf Kantor DPRD SUMUT yang telah membantu penulis dalam memberikan data informasi demi terwujudnya skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua yang saya cintai yang telah memberikan kasih sayang, doa dan bimbingan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sampai keperguruan tinggi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Ema SuciRamadhani, Reni Wida Simamora, Sofi Triawati Rumapea, Nurraya Nst, Handayani Napitupulu, dan Rosita yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan.

Medan, 2016

Penulis,

FITRI RAMADHANI

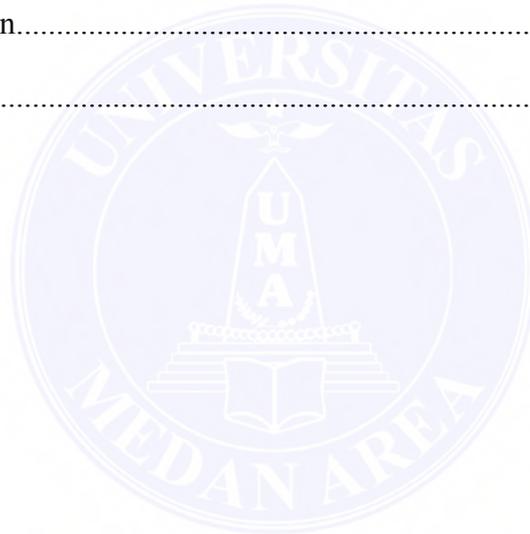


## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
B. Dana Alokasi Umum.....	10
C. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal .....	13
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	21
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Hipotesis .....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25

B.	Populasi dan Sampel .....	26
C.	Jenis dan Sumber Data .....	27
D.	Defenisi Operasional .....	28
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	29
F.	Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>3</b>
A.	Hasil Penelitian .....	36
B.	Pembahasan .....	51
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Jenis belanja Modal dan komponen-komponennya .....	18
Tabel II.2 Tinjauan Terlebih dahulu .....	21
Tabel III.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	26
Tabel IV.1 Data Pendapatan Daerah.....	46
Tabel IV.3 Data Dana Alokasi Umum.....	49
Tabel IV.4 Data Pengalokasian Anggaran Belanja Modal .....	50
Tabel IV.5 Uji Normalitas .....	51
Tabel IV.6 Uji Muktikolonieritas .....	53
Tabel IV.7 Regresi Linear Berganda .....	55
Tabel IV.8 Uji t parsial .....	57
Tabel IV.9 Koefisien Determinasi .....	58
Tabel IV.10 Uji F .....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	24
Gambar IV.2 Struktur Organisasi .....	41
Gambar IV.3 Uji Normalitas.....	52
Gambar IV.4 Uji Heteroskedastisitas .....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tugas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwa antara legislative dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada Pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implicit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislative dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana

operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi, 2006).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli**

## **Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai masukan bagi peneliti sehubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat di dalam APBD.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2004 : 67) : “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132),” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatannya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah mengurangi ketergantungan daerah tersebut atas transfer dari pemerintah.

#### **1. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

##### **a. Pajak daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “Turan yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku”. Jenis-jenis pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan c, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. retribusi daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

c. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bias dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada

pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/24). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

## **B. Dana Alokasi Umum**

Menurut Saragih (2003 : 98) : “kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah”.

Menurut Halim (2004 : 141), “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dari penjelasan diatas, terlihat Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respons pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

“Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan” (Saragih, 2003 : 104). “Distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif besar” (Sidik, 2004 : 96). Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan

formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia.

### **1. Cara Menghitung Dana Alokasi Umum**

Cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

### **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.**

Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004). Menurut Harianto (2007) memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU.

## C. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

### 1. Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, dan pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Anggaran operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

b. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

## **2. Belanja Modal**

Menurut Halim (2004 : 73), “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”.

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu, termasuk pula didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasar Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi belanja publik dan belanja aparatur.

- a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu belanja modal tanah; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan/penggantian peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berikut ini tabel jenis belanja modal dan komponen-komponennya :

**Tabel II.1**

**Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Modal Pembebasan Tanah</li><li>2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah</li><li>3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah</li><li>4. Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah</li><li>5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah</li><li>6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah</li></ol>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan</li><li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan</li><li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan</li><li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan</li><li>5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan</li><li>6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan</li><li>7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan</li></ol>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin</li><li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin</li><li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin</li> <li>6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin</li> <li>7. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin</li> </ol>
<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan</li> <li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan</li> <li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan</li> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan</li> <li>6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan</li> <li>7. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan</li> <li>8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan</li> <li>9. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan</li> <li>10. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan</li> <li>11. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan</li> <li>12. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan</li> <li>13. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama,Irigasi dan Jaringan</li> </ol>

	14. Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya</li> <li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya</li> <li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya</li> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya</li> <li>6. Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya</li> </ol>

Sumber : Syaiful, 2006

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

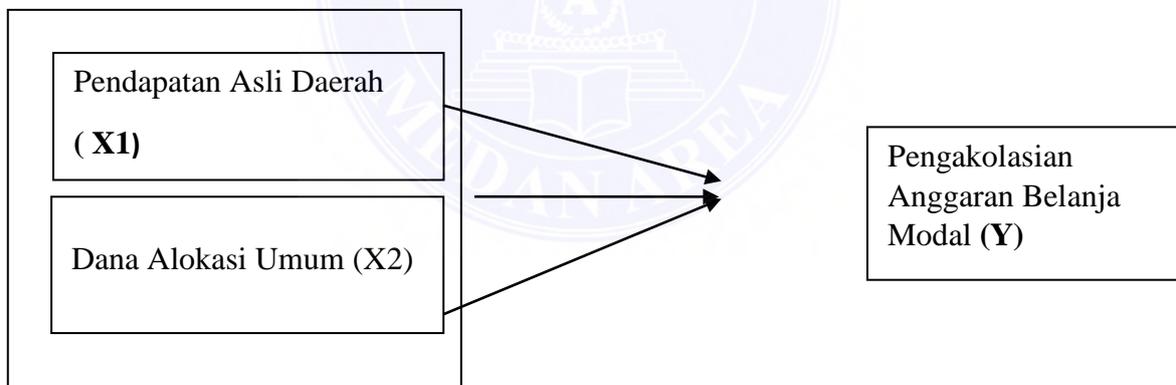
<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2010)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa	Variabel depende: Belanja Pemda Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Secara parsial dan atau secara simultan DAU dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

<p>Priyo Hari Adi (2011)</p>	<p>Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Bali selama periode 2005-2010</p>	<p>Variabel dependen: PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: Belanja Pembangunan</p>	<p>Belanja Pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD</p>
<p>Monika Siagian (2009)</p>	<p>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lain- lain yang dianggap sah terhadap belanja Pemerintah daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara</p>	<p>Variabel dependen: Belanja Pemerintah daerah Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lain- lain yang dianggap sah</p>	<p>Secara parsial maupun secara simultan DAU, PAD dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah</p>

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumber daya. Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada daerah tersebut.



**Gambar II.1**

### **Kerangka Konseptual**

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang masih akan diuji kebenarannya melalui analisis data yang akan digunakan dan akan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan

kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H2 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H3 : pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Fatma (2012:20) "Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih".

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara di Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan.

##### 3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Sept 2016.

Tabel III.1

Rencana Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	Apr 16				Mei 16				Juni 16				Juli 16				Agust 16				Sept 16			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul				■																				
Bimbingan Seminar proposal					■	■	■	■	■															
Pengumpulan data dan Analisis data												■	■	■	■	■								
Bimbingan skripsi dan penyelesaian skripsi																	■	■	■	■	■			
Sidang Meja Hijau																								■

## **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Sumatera Utara tahun 2015, yaitu sebanyak 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara.

### **2. Sampel Penelitian**

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004 : 73). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005 : 78).

Beberapa kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sample adalah :

- a. Tersedianya data realisasi PAD, DAU dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara periode 2015.
- b. Laporan realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara yang memakai format Kepmendagri 29/2002.

Berdasarkan kedua kriteria, didapatkan sebanyak 33 sampel di Provinsi Sumatera Utara.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini

menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2015. Data penelitian berupa :

a. Data Primer

Data primer yaitu data realisasi yang didapat dari referensi pembukuan dan alokasi dana anggaran belanja PAD, DAU dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data produk yang didapat dari dokumen-dokumen tertulis dengan mempelajari berbagai tulisan, buku-buku, jurnal-jurnal Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

**D. Definisi Operasional**

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan: **PAD=HPD+RD+PLPD+LPS**

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun Kabupaten / Kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

Penghitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU No.33 tahun 2004

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

Alokasi dasar = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan.

## 3. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Belanja Modal Adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005: 110).

Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005).

#### **b. Uji Heterokedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-studentized (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

#### 1. Melihat nilai tolerance

Jika nilai tolerance  $> 0,10$ , maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Jika nilai tolerance  $< 0,10$ , maka artinya terjadi multikolinieritas.

#### 2. Melihat nilai VIF

Jika nilai VIF  $< 10,00$ , maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Jika nilai VIF > 10,00, maka artinya terjadi multikolonieritas.

## 2. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis ( $H_a$ ) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana;

Y = Belanja Modal

a = konstanta

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$b_1$  = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah

$b_2$  = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum

## 3. Hipotesis

### a. Uji Signifikan Parsial (Uji - t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel Independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2005).

Bentuk pengujianya adalah :

$H_0$  :  $b_1, b_2, b_3 = 0$  , artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

$H_a$  :  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$  , artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Pengujian dilakukan menggunakan uji  $t$  dengan tingkat pengujian pada  $\alpha = 5\%$  derajat kebebasan (degree of freedom) atau  $df = (n - k)$ .

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_a$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

#### **b. Uji Signifikan Simultan (Uji – F)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujianya adalah :

$H_0$  :  $b_1, b_2, b_3 = 0$  , artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

$H_a$  :  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$  , artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$

$H_a$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

#### **c. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)**

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011).

Apabila analisis yang digunakan adalah R Square. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square. Nilai adjusted r square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2004. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali*”, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Arsyad, Lincolin, 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2008.
- Bastian, Indra, 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali*”, Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007.
- Erlina dan Sri Mulyani, 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Usu Press, Medan.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Hari, Priyo Adi, 2007. “*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Studi Kasus Kabupaten/Kota se Jawa-Bali*”, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.